

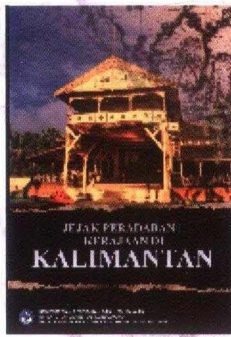


Direktorat
Kebudayaan

JEJAK PERADABAN : KERAJAAN DI KALIMANTAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR



**Penanggung Jawab
Kepala**
Drs. Budhy Sancoyo, M.A.

Redaktur
Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A.

Editor
Drs. Budi Istiawan
Vinsensius Ngesti Wahyuono, S.S.

Sekretaris
Andi Sultra Handayani, S.S.

Tata Letak
Triza Galih Gumilang, S. T.
Ahmad Rizki Zulfikar, S.Kom.

JEJAK PERADABAN :

Alamat

Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Wilayah Kerja Kalimantan

Jl. H.A.M. Rifaddin No. 69 Samarinda
Kalimantan Timur

Telp. (0541) 4104522

Fax. (0541) 4104523

E-mail: bpcb_samarinda@yahoo.com

Dicetak Oleh:
CV.MULIATAMA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

LATAR BELAKANG

Kalimantan atau yang biasa dikenal dengan Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, setelah *Greenland* dan Papua. Kalimantan terletak di tengah perairan Asia Tenggara Kepulauan, yang saat ini secara administrasi terbagi dalam wilayah Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Jawa dan Selat Karimata. Pulau seluas 743,330 km² ini merupakan jembatan strategis yang menghubungkan Kepulauan Filipina, Semenanjung Melayu, Sumatra, Sulawesi dan Jawa. Selain wilayahnya yang luas, Kalimantan juga dikenal dengan pulau seribu sungai. Beberapa

sungai yang terkenal karena panjang dan sangat luas di Kalimantan adalah Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Arut, dan Sungai Lamandau. Sungai-sungai tersebutlah yang kemudian menjadi jalur transportasi sejak zaman prasejarah, hingga saat ini. Sungai menjadi sangat penting bagi hubungan perdagangan dan politik antara kerajaan yang ada di Kalimantan dengan kerajaan-kerajaan besar yang ada di luar Kalimantan. Pedagang yang masuk ke wilayah Kalimantan tidak sekedar membawa barang dagangan, tetapi juga dibarengi dengan misi menyebarkan agama Islam yang sasaran utamanya adalah kerajaan-kerajaan yang sudah ada.

Sebelum Islam menyebar di wilayah Kalimantan, Hindu-Budha masuk dan berkembang lebih dulu. Hal tersebut dibuktikan dengan tinggalan Hindu-Budha yang saat ini masih ada di beberapa wilayah. Bukti tinggalan tersebut adalah Candi Negeri Baru dan Relief Stupa Situs Gunung Totek di Kalimantan Barat, Candi Agung dan Candi Laras di Kalimantan Selatan, dan Yupa di Lokasi Muara Kaman di Kalimantan Timur sebagai bukti sejarah tertua.

Berbicara masalah kerajaan yang ada di Kalimantan, tidak lepas dari proses Islamisasi di Pulau Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan melalui dua arah, yaitu arah barat dari Malaka dan arah selatan dari Jawa. Jatuhnya Malaka ke tangan

Portugis pada 1511 mengakibatkan perkembangan Islam semakin pesat. Pedagang-pedagang Islam pindah dari Malaka, kemudian bermukim dan melakukan perniagaan ke daerah-daerah Indonesia bagian timur. Oleh sebab itu, proses Islamisasi di Indonesia khususnya di wilayah bagian timur berlangsung efektif sejak dasawarsa kedua abad ke-16. Para pedagang-pedagang dari Malaka pindah dan menetap di pesisir Kalimantan Barat, yang dimana wilayah tersebut merupakan penghasil dan menjadi pusat perdagangan intan. Proses perpindahan para pedagang Islam di pesisir Kalimantan Barat menjadi cikal bakal berdirinya dua Kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Brunai di

bagian selatan dan Kerajaan Sukadana di bagian barat.

Perkembangan Islam di wilayah bagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur banyak dilakukan oleh orang-orang Islam dari Jawa. Guru-guru agama (mubalig) Islam dikirim untuk menyiarkan Islam di daerah ini oleh kerajaan Islam Demak di pantai utara Pulau Jawa. Hubungan erat yang telah terjalin sejak masa-masa sebelumnya semakin mempermudah proses pengislaman di wilayah tersebut. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan dipusatkan di Banjarmasin, yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Banjar yang sudah dikenal dalam sejarah. Kemudian di Kalimantan Timur berdiri pula Kerajaan Islam Kutai, yang pada dasarnya

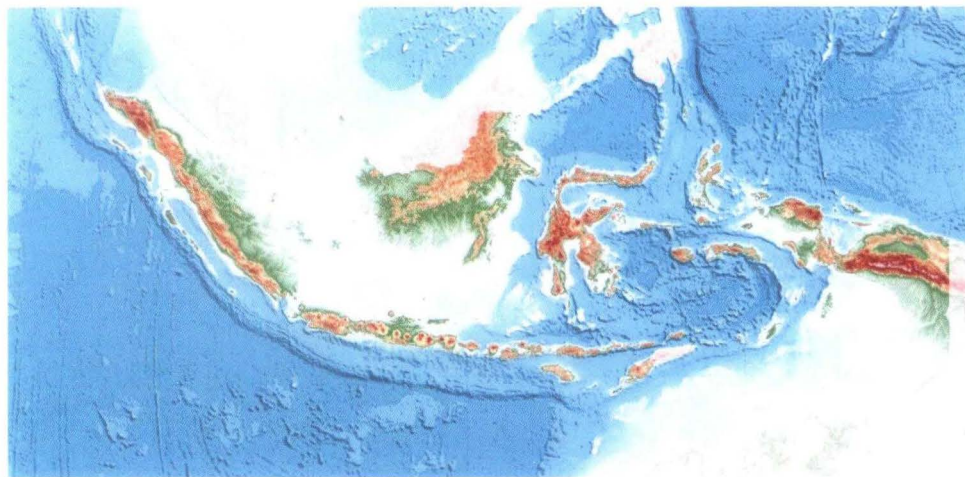
sebagai kelanjutan Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu.

Ada empat kerajaan besar yang menjadi bukti agama Islam masuk dan berkembang di wilayah Kalimantan, dan sampai saat ini tercatat dalam sejarah. Empat kerajaan tersebut adalah Kerajaan Brunei, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Banjarmasin dan Kerajaan Kutai. Kerajaan Brunei berdiri pada awal abad ke-16, terletak di pesisir barat Kalimantan Utara. Pengaruh Islam dari Kerajaan Brunei ini kemudian menyebar sampai ke Filipina, karena banyak mubalig-mubalignya yang dikirim ke pulau-pulau di Filipina Selatan. Kerajaan Sukadana terletak di bagian barat daya Pulau Kalimantan. Kerajaan Sukadana, seperti dengan kerajaan-kerajaan lainnya, nama Kerajaan

Sukadana diambil dari nama Ibu Kota kerajaan itu. Pada tahun 1550 agama Islam mulai masuk di Kerajaan Sukadana, yang disiarkan oleh guru-guru agama Islam (mubalig) yang datang dari Jawa, di samping dari Malaka atau Palembang. Kerajaan Banjar yang beribukota di Banjarmasin terletak di muara Sungai Barito, sehingga memungkinkan kapal-kapal besar berlabuh di sana. Perkembangan agama Islam di Kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur berbeda dengan yang ada di Kalimantan Selatan. Islam masuk di Kalimantan Timur bukan dalam situasi perpecahan dan perebutan tahta kekuasaan seperti halnya di

Kalimantan Selatan. Agama Islam masuk ke Kutai yang mendapat pengaruh dari Makassar oleh Tuan di Bandang (Datuk ri Bandang) dan Tua di Parangan pada akhir abad ke -16 ($\pm$ tahun 1575).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kekayaan dan keragaman budaya yang berkaitan dengan kerajaan dan kesultanan di Kalimantan turut mewarnai perkembangan sejarah kebudayaan di Indonesia. Oleh karena itu, disusunlah buku ini sebagai sarana informasi untuk mengenalkan kekayaan budaya yang direfleksikan melalui tinggalan materi (arkeologis) dan pendukung kebudayaan lainnya.



Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sumber: Badan Informasi Geospasial

JEJAK PERADABAN : KERAJAAN DAN KESULTANAN DI KALIMANTAN

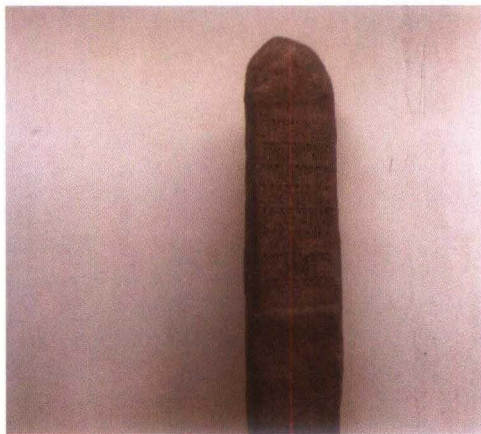
Kalimantan atau juga disebut Borneo pada jaman kolonial, adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Borneo yang berasal dari nama kesultanan Brune adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk kawasan timur pulau ini yang sekarang termasuk wilayah Indonesia.

Pulau Kalimantan memiliki sejarah yang sangat panjang sehingga banyak kerajaan dan kesultanan yang ada di pulau tersebut. Beberapa nama kerajaan dan kesultanan yang ada di pulau Kalimantan antara lain sebagai berikut.

Kerajaan Kutai (350-1605) M

Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.

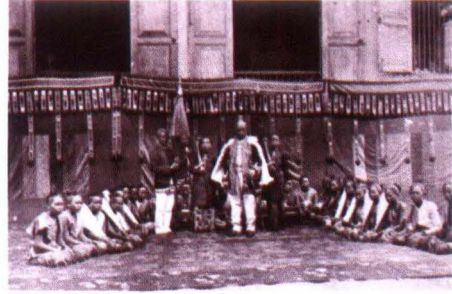
Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia kalah dalam peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibukota di Kutai Lama (Tanjung Kute).



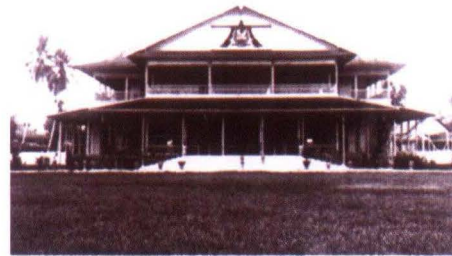
Kesultanan KutaKartanegara (1300-1960) M

Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.

Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia kalah dalam peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibukota di Kutai Lama (Tanjung Kute).



Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan pengiringnya, Sumber : Koleksi Tropen Museum



Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara pada masa Sultan Alimuddin, Sumber : Koleksi Tropen Museum

Kesultanan Banjar (1520-1860) M

Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri pada Tahun 1520, dihapuskan sepihak oleh Belanda pada 11 Juni 1860. Namun rakyat Banjar tetap mengakui ada pemerintahan darurat/pelarian yang baru berakhir pada 24 Januari 1905. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan terakhir di Martapura. Ketika beribukota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi.

Ketika ibukotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha yaitu kerajaan Hindu yang beribukota di kota Negara, sekarang merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan.



*Mesjid peninggalan Kesultanan Banjar,
Kesultanan Islam di Kalimantan*



*Mesjid peninggalan Kesultanan Banjar,
Kesultanan Islam di Kalimantan*

Kerajaan Batulicin dan Cantung (1780-1826) M

Kerajaan Batu Licin adalah kerajaan pecahan dari kerajaan Tanah Bumbu. Wilayah Batu Licin mencakup Daerah Aliran Sungai Batulicin serta daerah sekitarnya, yaitu wilayah kecamatan Batulicin sebelum dimekarkan menjadi 4 kecamatan : Batulicin, Simpang Empat,

Karang Bintang dan Mentewe. Penguasa pertama kerajaan Batulicin adalah Ratu Intan I (1780-1800).



Andi Ibrahim al Aydrus, puteramahkota Batulicin yang terakhir dan pangeran terakhir. Memerintah wilayah, setelah pemerintahan raja Batulicin sudah dihapus. 1905.

Pada 4 Mei 1826, Sultan Adam (raja Banjar) menyerahkan wilayah Batulicin kepada Hindia Belanda. Batulicin sekarang merupakan ibukota dari Kabupaten Tanah Bumbu. Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tidak sama dengan wilayah bekas Kerajaan Tanah Bumbu.

Kerajaan Bangkalan

Bangkalan adalah suatu wilayah pemerintahan sipil yang dikepalai seorang bumiputera yang berkedudukan di Samarinda.

Pemerintah swapraja daerah tersebut dikuasakan kepada seorang kepala bumiputera yaitu Pangeran Muda Muhammad Arifbillah Aji Samarang. Daerah ini sebelumnya adalah kerajaan Suku Dayak Bangkalan yang berdiri di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Sekarang wilayah kerajaan ini menjadi beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru yaitu Kecamatan Kelumpang Utara, Kotabaru, Kelumpang Hulu, Kotabaru, dan Kelumpang Selatan, Kotabaru. Raja yang terkenal dari daerah ini adalah Pangeran Agung atau Raja Agung.

Kesultanan Berau (1377-1826) M

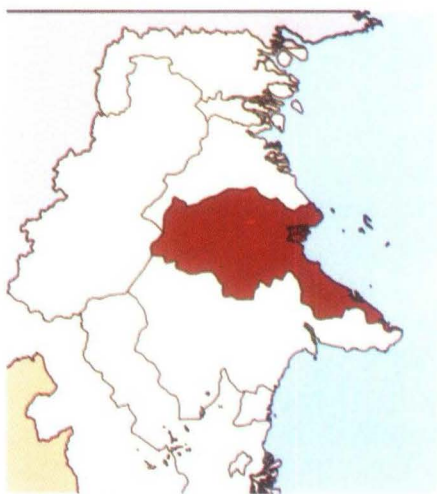
Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang. Raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat

pemerintahannya berada di Sungai Lati, Kecamatan Gunung Tabur.

Pada masa Sultan Adam dari Banjar dibuat perjanjian dengan Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Jacob Mossel, Gubernur Jenderal VOC di antaranya pasalnya menyerahkan vazal-vazal Banjar termasuk negeri Berau dan daerah-daerah lain di Kalimantan kepada Hindia Belanda. Perjanjian ini ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826 atau 26 Ramadhan 1241 H. Dalam perjanjian tersebut Kerajaan Banjar mengakui suzerinitas atau pertuanan Pemerintah Hindia Belanda dan menjadi sebuah *Leenstaat*, atau negeri pinjaman.



Jacob Mossel, Gubernur Jenderal VOC tahun 1750-1761



Wilayah Kesultanan Berau (pasca lepasnya wilayah Bulungan dan Tidung), Kalimantan Utara

Kesultanan Gunung Tabur (1800 -1953) M

Kesultanan Gunung Tabur adalah kerajaan yang merupakan hasil pemecahan dari Kesultanan Berau, di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an.



Lambang Kesultanan Gunung Tabur



Istana Kesultanan Gunung Tabur



Keluarga Kerajaan Gunung Tabur

Kesultanan ini sekarang terletak dalam wilayah kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, provinsi Kalimantan Utara.

Kesultanan Sambaliung (1800 -1960) M

Kesultanan Sambaliung (sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung) adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau, sekitar tahun 1810-an. Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan nama Raja Alam.

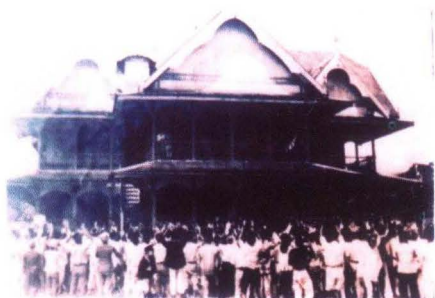


Keraton Kesultanan Sambaliung

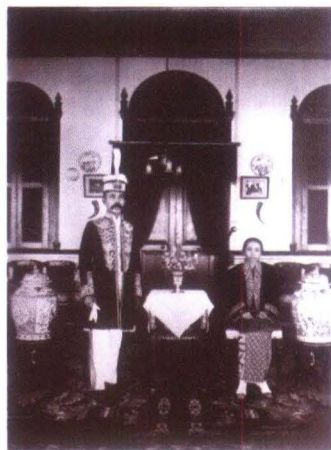
Raja Alam adalah sultan pertama di Tanjung Batu Putih, yang mendirikan ibukota kerajaannya di Tanjung pada tahun 1810. Tanjung Batu Putih kemudian menjadi kerajaan Sambaliung.

Kesultanan Bulungan (1731 – 1964) M

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau, Sabah sekarang.



Istana Kesultanan Bulungan pada abad ke-20.



Sultan Jalaluddin bersama permaisuri (tahun 1940).

Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Tragedi Bultiken (Bulungan, Tidung, dan Kenyah) dan wilayah Kesultanan Bulungan hanya menjadi kabupaten yang sederhana.

Kerajaan Kotawaringin (1615-1948) M

KerajaanKepangeranan Kotawaringin adalah sebuah kerajaan kepangeranan yang merupakan cabang keturunan Kesultanan Banjar dengan wilayah intinya sekarang yang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah.



Istana al-Nursari (terletak di Kotawaringin Lama) didirikan pada tahun 1615.

Pada tanggal 14 Januari 1946 daerah Kotawaringin dijadikan daerah pendudukan Belanda dan selanjutnya dimasukan dalam daerah Dayak Besar. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, status Kotawaringin menjadi bagian wilayah NKRI dengan status Swapraja/Kewedanan. Selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagai daerah otonom dengan Pangkalan Bun sebagai ibukota kabupaten yang ditetapkan dengan UU No 27/1959 dan Lembaran Negara No 72/1959.



Masjid Jami Kiai Gede di Kotawaringin merupakan masjid tertua di propinsi Kalimantan Tengah warisan dari kesultanan Kotawaringin.

Kerajaan Kubu (1772 -1958)

Kerajaan Kubu atau landschap Koeboe adalah padalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang Yang Dipertuan Besar yang pernah berdiri dalam wilayah yang sekarang terletak di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Syarif Hasan (1943 – 1958) ibni al-Marhum Syarif Muhammad Zainal Idrus al-Idrus, Tuan Besar of Kubu, diturunkan dari tahtanya saat Kesultanan Kubu dihapus oleh Pemerintah RI pada tahun 1958.



Istana Kerajaan Kubu, Kalimantan Barat



Komplek pemakaman kerabat Kerajaan Kubu yang terletak di sebelah Istana

Kerajaan Kuripan (... -1837) M

Kerajaan Kuripan, atau disebut pula Kahuripan, adalah kerajaan kuno yang beribukota di kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Kerajaan Kuripan berlokasi di sebelah hilir dari negeri Candi Agung (Amuntai Tengah). Sebutan Kerajaan Tabalong berdasarkan nama kawasan di mana kerajaan tersebut berada. Sedangkan nama Kuripan

mungkin nama ibukotanya saat itu.



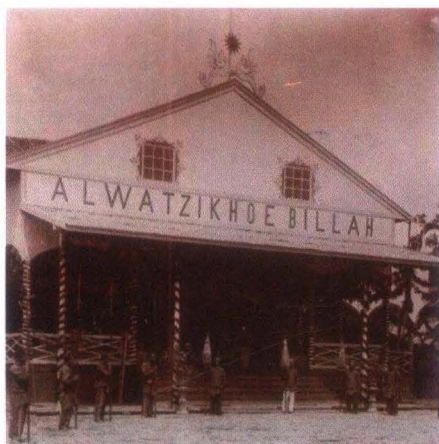
Candi Agung berada di Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Nama Kuripan diduga adalah nama lama Amuntai (kota) di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di sekitar muara sungai Tabalong.

Kesultanan Sambas (1671–1950) M

Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat dengan pusat pemerintahannya adalah di Kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Pada sekitar tahun 1671 Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman

sebagai sultan pertama Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Shafuiddin. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas ini adalah ditempat yang baru di dekat muara Sungai Teberrau yang bernama Lubuk Madung.



Ibukota Negeri Sambas Lubuk Madung

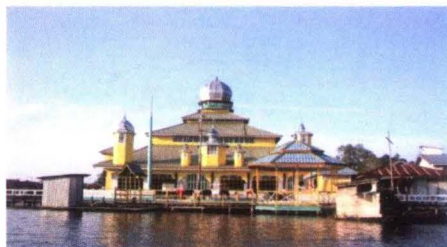


Istana Alwatzikhoebillah dari Kesultanan Sambas terlihat masih kokoh berdiri.

Setelah Jepang di bom atom oleh Sekutu, Pemerintahan Kesultanan Sambas berdiri kembali oleh sebuah Majelis Kesultanan Sambas dibawah pimpinan Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma Muchsin Panji Anom, hingga kemudian dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, Majelis Kesultanan Sambas kemudian memutuskan untuk bergabung dalam Republik Indonesia Serikat melalui Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada tahun 1950.

Kerajaan Selimbau (600 - 1925) M

Kerajaan Selimbau adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.



Masjid Jami At Taqwa Selimbau ini menjadi salah satu bukti peninggalan kerajaan Selimbau Darussalam. Sekaligus sebagai simbol kejayaan Islam di Selimbau.

Kerajaan Selimbau merupakan mempunyai susunan pemerintahan yang lengkap. Kerajaan Selimbau dahulu bernama Kerajaan Pelembang, didirikan oleh sri paduka maharaja Bindu Mahkota. Selanjutnya kerajaan dipindahkan ke Sungai Terus oleh Pangeran Suta Muhammad Jalaludin dan menjadi Kerajaan Islam. Kerajaan Islam ini diberi nama Kerajaan Selimbau.

Kerajaan Sintang (Abad 4-1950) M

Kerajaan Sintang adalah Kerajaan Hindu kemudian menjadi Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

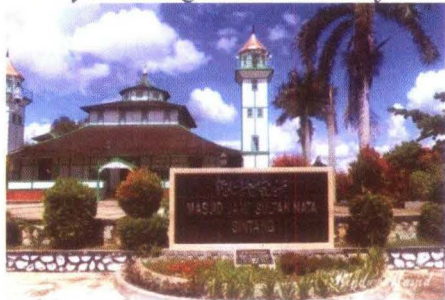


Istana lama Kesultanan Sintang



Istana Kesultanan Sintang

Penguasa Kerajaan Sintang disebut Panembahan Sejarah awal Kerajaan Sintang dimulai ketika seseorang bernama Aji Melayu datang ke daerah Kujau



Masjid Jamik Sultan Nata merupakan salah satu peninggalan sejarah di Provinsi Kalimantan Barat

sekitar abad ke-4 Maschi. Kedatangan Aji Melayu ternyata membawa kebudayaan Hindu masuk ke ranah Melayu di Kalimantan Barat, khususnya ke daerah Sintang.



Panembahan Sintang, Pangeran Ratu Sri Negara
HRM Ikhsan Perdana

Pengaruh Islam mulai masuk ke Kerajaan Sintang ketika kerajaan ini diperintah oleh Raden Purba. Setelah Raden Purba meninggal, tahta Kesultanan Sintang dipegang oleh Adi Nata bergelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin Sa'adul Khairiwaddin.

Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) secara langsung turut berpengaruh terhadap eksistensi Kesultanan Sintang. Sesuai dengan kesepakatan untuk membentuk RIS, maka Indonesia dibagi ke dalam 16 negara bagian, termasuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi perubahan dari RIS ke bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Perubahan bentuk tersebut mengubah status Kesultanan Sintang menjadi swapraja yang kemudian menyerahkan (melebur) kekuasaannya ke dalam NKRI.

Kerajaan Tidung (1551-1916) M

Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan adalah kerajaan yang memerintah Suku Tidung di Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu. Sebelumnya terdapat dua kerajaan di kawasan ini, selain Kerajaan Tidung, terdapat pula Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas.



Wilayah Kerajaan Tidung atau Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) berdiri sejak abad ke-9 M dan runtuh pada abad ke-20 lantaran siasat licik pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Adua fase untuk menggambarkan sejarah dari Kerajaan Tidung, yaitu fase Kerajaan Tidung Kuno dan Kerajaan Tidung (Kerajaan Tarakan). Kerajaan Tidung Kuno merupakan cikal bakal dari berdirinya Kerajaan Tidung. Sejak pusat pemerintahan Kerajaan Tidung Kuno menetap di Tarakan pada tahun 1557 M, mulai saat itulah Kerajaan Tidung Kuno dikenal dengan nama Kerajaan Tidung atau Kerajaan Tarakan.

Ketika Datoe Maoelana Amir Bahar wafat, tahta Kerajaan Tidung diserahkan kepada Datoe Adil, putera sulung hasil pernikahan antara Datoe Maoelana Amir Bahar dengan Ratu Intan Doera. Datoe Adil memerintah di Kerajaan Tidung antara tahun 1896-1916.

Kerajaan Tanjungpura (1454-1950) M

Kerajaan Tanjungpura atau Tanjompura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Kerajaan yang terletak di Kabupaten Kayong Utara ini pada

abad ke-14 menjadi bukti bahwa peradaban negeri Tanah Kayong sudah cukup maju pada masa lampau. Tanjungpura pernah menjadi provinsi Kerajaan Singhasari sebagai Bakulapura. Nama bakula berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tumbuhan tanjung (Mimusops elengi), sehingga setelah dimelayukan menjadi Tanjungpura.

Pada masa pemerintahan Panembahan Karang Tanjung (1487-1504), pusat Kerajaan Tanjungpura yang semula berada di Negeri Baru dipindahkan ke Sukadana, dengan demikian nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Sukadana. Sukadana merupakan nama yang disebutkan untuk kerajaan ini dalam Hikayat Banjar.



Istana Muliakarta, kerajaan Tanjungpura

Kerajaan Tanjungpura dalam perspektif sejarah disebutkan, bahwa, dari negeri baru kerajaan Tanjungpura berpindah ke Sukadana sehingga disebut Kerajaan Sukadana, kemudian pindah lagi Ke Sungai Matan (sekarang Kec. Simpang Hilir).



Festival Kerajaan Matan Tanjungpura V

Dan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin sekitar tahun 1637 pindah lagi ke Indra

Laya sehingga disebut Kerajaan Indralaya. Indra Laya adalah nama dari satu tempat di Sungai Puye anak Sungai Pawan Kecamatan Sandai. Kemudian disebut Kerajaan Kartapura karena pindah lagi ke Karta Pura di desa Tanah Merah, Kec. Nanga Tayap, kemudian baru ke Desa Tanjungpura sekarang (Kecamatan Muara Pawan) dan terakhir pindah lagi ke Muliakarta di Keraton Muhammad Saunan yang ada sekarang yang terakhir sebagai pusat pemerintahan swapraja.



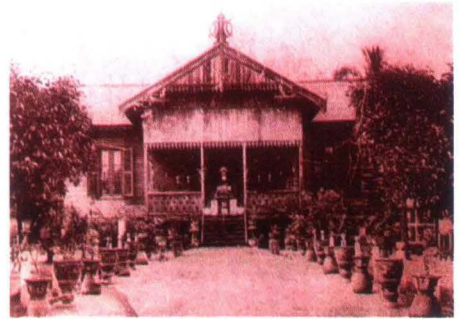
Keraton Sanggau

Sejarah Kerajaan Sanggau

Nama Sanggau diambil dari nama batang sungai Sanggau. Menurut lidah, atau *spiling* Melayu asli Saggau, perkataan yang asli adalah Sangau. Diakui secara tradisi dan mitoisme bahwa kesultanan Sanggau berdiri seelah kesultanan Tanjung Pura, atau Sukadana atau kesultanan Simpang yang merupakan keturunan Prabu Djaya yang bergelar Pangeran Mas Prabu Djaya yang bersinggashana di Sukadana. Menurut cerita rakyat, masyarakat dari etnis Dayak maupun Melayu menyebutkan bahwa pendiri pertama Sanggau adalah Dara Nante yang bukan asli penduduk Sanggau, melainkan seorang dari kesultanan Sukadana.

Secara turun-temurun diceritakan kepada masyarakat bahwa Babai Cinga suami dari Dara Nante berasal dari keturunan Dayak Sisang Hulu Sekayam. Konon diceritakan bahwa dia memiliki penyakit *prambosia* suatu penyakit yang menular dan menjijikan yang menyebabkan dirinya diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri. Dalam pengasingannya dia melakukan semua hal sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Konon sebuah cerita bahwa salah satu air seni (air kencing) yang mengenai sebuah pohon mentimun tersebut, yang kemudian hanyut dibawah oleh air batang Sungai Sekayam yang terus menuju ke Sungai Batang Kapuas, dimana dalam buah mentimun tersebut tersimpan sperma Babai Cinga. Buah itu

ditemukan oleh Dara Nante. Dara Nante yang sedang kelaparan memakan buah mentimun, yang membuat dirinya mengidam serta mengandung tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Banyak orang menuduhnya melakukan zina dengan seorang lelaki.



Pada masa itu karena belum memiliki pegangan agama, maka dicarilah tukang tenun atau dukun untuk membuat ramalan untuk mencari seorang lelaki yang menyimpan sperma didalam buah mentimun tersebut. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Dara Nante

bertemu dengan Babai Cinga, kemudian dia membawanya untuk dipersembahkan kepada orang tuanya. Ketika mereka tiba di Mengkiang, penyakit yang diderita oleh Babai Cinga sembuh yang konon penyakit tersebut telah dimakan oleh ikan Kerak.



Kesultanan Melayu Sanggau bermula dari seorang utusan dari tanah Jawa, terutama Daerah Banten yang bernama Kiayi Patih Gemintir, yang merupakan salah satu seorang murid kepada Maulana Malik Ibrahim (Wali Songo), yang sengaja diutus untuk

berdakwa didaerah pedalaman Kalimantan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, tetapi terdapat ahli sejarah yang mengatakan bahwa ketika Maulana Malik Ibrahim bedagang sambil berdakwah di Gresik, dan daerah Banten dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Santri-santri yang telah mendapat gelar Kiayi dari pondok pesantren, dengan sengaja mereka akan dikirim kepulauan-pulau di Nusantara, salah satunya di pedalaman Kalimantan Barat.

Dalam catatan sejarah yang menggunakan bahasa Arab Jawi (Arab Melayu), bahwa Kiayi Patih Gemintir merupakan gelar kebesaran Abang Abdurrahman yang berkuasa pada tahun 1450-1485 M. Abang Abdurrahmanlah orang pertama yang menggunakan

nama "ABANG" di Sanggau.

Berdasarkan data manuskrip, baik yang utuh berbahasa Arab Jawi maupun terjemahannya bahwa Abang Awal atau Abang Awaludin adalah anak menantu dari Abang Abdurrahman. Kiayi Patih Gemintir merupakan salah satu murid utusan untuk tanah Borneo, pedalaman pesisir Sungai Kapuas. Dicatatkan dalam sejarah Abang Abdurrahman berkuasa selama 35 tahun dan Abang Awal berkuasa selama 40 tahun di istana Mengkiang, Sanggau.

Raffles, yang merupakan seorang ahli sejarah dan ilmuwan antropologi yang terkenal, pernah mengatakan bahwa ada seorang tokoh yang sangat terkenal dengan nama Raja Chermen, yang datang dari seberang untuk

mengislamkan Raja Majapahit, Prabu Angka Wijaya. Raja Chermen merupakan sepupu dari Maulana Malik Ibrahim, mereka berdua mendirikan sebuah masjid di Leran, Jenggala Tanah Jawa. Di Masjid ini Raja Chermen dan sepupunya banyak mengislamkan penganut Hindu dari berbagai wilayah Nusantara, termasuk Kalimantan Barat. Setelah Raja Chermen meninggal dunia di Leran, Jenggala, sepupunya Maulana Malik Ibrahim pindah ke Gresik, dan tanah Banten. Disana beliau mendirikan pondok pesantren dan memiliki murid Kiayi Patih Gemintir yang diutus untuk berdakwah di pedalaman pesisir Sungai Kapuas. Dalam melakukan dakwah tersebut Kiayi Patih Gemintir singgah di Mengkiang, Sanggau, kemudian

mendirikan sebuah Kesultanan di tanah Mengkiang, Sanggau.



Masjid Sultan Suriansyah, Masjid Tertua Peninggalan Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan

Kerajaan Banjar

Kerajaan Banjar merupakan kerajaan yang berdiri di tahun 1526 M, yang berpusat di kerajaan Kuin, suatu daerah yang strategis di Banjarmasin yang tidak jauh dari pertemuan sungai-sungai besar. Pada periode kerajaan Banjar berpusat di Kuin, telah memerintah Sultan Suriansyah, Sultan Rahmatullah dan terakhir Sultan Hidayatullah. Adanya serangan dari Belanda pada tahun 1612 mengakibatkan kraton terbakar, sehingga status sebagai pusat pemerintahan tidak memungkinkan untuk dipertahankan,

karena situasi demikian dianggap tidak aman, terancam dan sudah tercemar hegemoni sebagai pusat kerajaan.

Dengan keadaan seperti ini keluarga bangsawan kerajaan Banjar memutuskan untuk segera keluar dari kemelut, dengan cara memindahkan pusat kerajaan Banjar. Pusat pemerintahan kerajaan Banjar dari Banjarmasin (Kuin), kemudian dipindahkan oleh Sultan Mustaimillah ke Sungai Kitanu akibat adanya konflik dengan Belanda. Setelah perpindahan kerajaan Banjar yang ada di Kuin maka lokasi tersebut difungsikan sebagai makam Sultan Suriansyah atau Raja pertama kerajaan Banjar yang dahulu pernah bertahta. Sehingga sejak ditinggalkan pada tahun 1612, Kuin, tidak pernah lagi difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Banjar.

Dari pemetaan yang dilakukan di kawasan tersebut Kayu Tangi dapat diketahui bahwa pusat pemerintahan kerajaan Banjar pada waktu itu adalah berada pada areal yang di batasi oleh Sungai Martapura, dan diapit oleh Sungai Kitanu dan Sungai Batang Banyu.

Secara politik-ekonomi, Belanda berkeinginan untuk menguasai Kerajaan Banjar. Usaha Belanda untuk menjalin hubungan dagang terus dilakukan terhadap Kerajaan Banjar, hal ini sebagai usaha mendekati dengan maksud dan tujuan untuk menguasai yang terus dilancarkan. Kebijakan-kebijakan dikerajaan Banjar mulai kurang solit sehingga mengakibatkan berdirinya kongsi-kongsi dagang Belanda dan

berhasil mentanapkan imperialismenya, perkembangan dan kemajuan kongsi perdagangan Belanda tampaknya berkembang kearah monopoli.

Pada tahun 1635 ditandatangani perjanjian yang mengarah pada monopoli perdagangan antara Sultan dengan pihak Kompeni Belanda. Kompeni Belanda mulai menunjukkan kekuasaannya dengan mengontrol produk lada rakyat, yang tidak segan-segan untuk melakukan pembakaran.

Menurut sumber kedatuan yang ditemukan, perpindahan pusat Kerajaan Banjar dari Dalam Pagar/KayuTangi ke Martapura dipindahkan oleh Sultan Saidullah, ssedangkan menurut sumber Belanda yang ada perpindahan tersebut sebagai "alih" *ahur keturunan Tamjidillah*

yang mengalir kepada pengeran Nata Alam sebagai Sulta Saidillah atau Halilullah atau Tahmidillah.

Perpindahan dari Martapura ke Karang Intan ini tidak meninggalkan kontroversi, karena hanya dilakukan selama satu periode pada masa pemerintahan Sultan Suleman Rahmatullah. Perpindahan yang kembali dari Karang Intan ke Martapura yang dilakukan oleh Sultan Adam Al Wasikubillah pada tahu 1825 yang memerintah hingga tahun 1857, yang dimungkinkan karena masa ini cengkeraman Belanda yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Pada masa kejayaan Kerajaan Banjar meliputi daerah yang sangat luas, meliputi daerah Banjar yang secara administrasi hampir sama dengan wilayah yang ada di provinsi Kalimantan

Tengah. Dengan luas wilayah kerajaan Banjar ini mendatangkan rasa iri dari kolonialis barat untuk terus berusaha mendekati dan menguasai, untuk memenuhi ambisi dari Belanda.

Pada setiap pergantian sultan mungkin munculnya suatu perselisihan. Hal tersebut dialami oleh Kesultanan Banjar. Dalam pergantian tersebut sultan yang menggantikan dianggap belum cukup dewasa, sehingga dalam pemerintahannya kekuasaan dipegang oleh seorang Mangkubumi yang secara genealogis merupakan saingan. Perlawanan-perlawanan dan usaha yang terus dilakukan untuk keluar dari pengaruh imperialis Belanda yang tak pernah surut dari para pemimpin Kerajaan Banjar.



7 Prasasti Kerajaan Kutai yang di pameran di museum Muara Kaman

Sejarah Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kutai juga merupakan nama untuk mengidentifikasikan beberapa hal, antara lain etnis dan kebudayaannya termasuk bahasa dan sebagainya, lokalitas geografis dan kerajaan Hindu Kuno di Nusantara. Istilah Kutai sebagai nama suku merupakan identifikasi umum terhadap kelompok masyarakat yang mendiami daratan timur Pulau Kalimantan terutama di pesisir Sungai Mahakam sejak Muara Kaman menjadi bandar perdagangan pada abad ke-4 Masehi.

Pada versi pertama, nama Kutai diberikan oleh pedagang dari India Selatan yang berkunjung ke Muara Kaman dan menyebutkan kerajaan yang didirikan oleh Asmawarman putra Kundugga tersebut sebagai Queitaire, yang berarti hutan belantara. Versi kedua, dalam berita Champa nama Kutai berasal dari sebutan Kho-Thay yang berarti kerajaan besar, pendapat ini banyak dipegang oleh kalangan birokrat lokal Kutai dan Kaltim sejak masa

Orde Baru. Versi ketiga, berasal dari penyebutan Mpu Prapanca dalam kitab Negarakretagama (1365), yakni Tunjung Kute, sebagai salah satu dari nama wilayah di Kalimantan yang takluk kepada kerajaan Majapahit pada abad ke-14 pada masa Hayam Wuruk. Dan versi yang keempat, Kutai berasal dari perpaduan kata tupai,petai,pantai, dan kumpai, sebagaimana dihikeyatkan Salasilah Kutai.

Menurut catatan sejarah yang berupa inskripsi pada *yupa* (tiang korban) yang ditemukan disekitar daerah Muara Kaman, disebutkan bahwa didaerah tersebut berdiri suatu Kerajaan Hindu-Kutai sekitar abad ke-5. Hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallawa diatas Yupa yang ditemukan. Penemuan-penemuan itu berupa sebuah patung Wisnu dari emas, sebuah gelang dariemas, sebuah patung Budha dari perunggu dan beberapa benda kecil

lainnya yang berasal dari Hindu. Berawal dari temuan-temuan yang ada dapat disimpulkan bahwa kerajaan Kutai mendapat pengaruh langsung dari India. Wilayah kerajaan Kutai, yang menurut cerita rakyat, dulunya merupakan suatu daerah yang bernama “Nusantara” yang artinya “tanah yang terpotong”. Tromp yang berpendapat bahwa Kutai Lama, yang merupakan pusat Kesultanan Kutai Kertanegara, dulunya berasal dari nama “Nusantara”.

Kerajaan ini menurut PJ Veth, adalah Kesultanan Kutai Kertanegara yang merupakan bawhan Kerajaan Majapahit di Jawa. Bukti lain tentang Kutai terdapat dalam Kronik Pasei berbahasa Melayu, yang menyebutkan bahwa Kutai menjadi koloni Hindu-Jawa di Kalimantan Selatan setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Nama Kutai juga ditemukan didalam buku Negarakretagama yang berisi syair-syair pujian terhadap Raja Hayam Wuruk di Majapahit. yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Ketika kerajaan Kutai Kertanegara masih berada di bawah pengaruh Majapahit, pimpinan Kerajaan Majapahit menempatkan seorang wakilnya di kerajaan tersebut. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, maka penguasa Kesultanan Kutai jatuh ke tangan Kerajaan Banjarmasin, yang pada waktu itu di perintah oleh Pangeran Samudra. Penduduk wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara didiami oleh berbagai suku bangsa, baik suku bangsa Dayak, Kutai maupun asing. Orang Dayak yang menjadi penduduk Kutai Kertanegara, mereka mendiami daerah pedalaman Kutai disepanjang aliran

dan anak cabang Sungai Mahakam, bahkan jauh ke pedalaman yang sukar dijangkau dengan jalan darat.

Orang Kutai tersebar di wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara, terutama di daerah-daerah tepian Sungai Mahakam, yaitu Tenggarong, Kota Bangun, Muara Pahu, dan Melak. Orang Bugis menempati wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara sejak tahun 1686. Orang Bugis yang menempati pantai timur Kalimantan kebanyakan berasal dari Kerajaan wajo, di Kesultanan Kutai ini orang Bugis pertama kali mendiami Samarinda yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah kerajaan ini sebagai pedagang. Orang Banjar berdiam di daerah pesisir Sungai Mahakam dan menyebar diseluruh daerah Kutai. Kesultanan Kutai juga dikenal sebagai salah satu daerah maritim di Kalimantan. Keadaan alam Kutai Kertanegara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertanian karena letaknya yang berada di pesisir, menyebabkan kegiatan ekonomi perdagangan di Sungai Mahakam menjadi sangat penting.

Disisi lain secara bersamaan Belanda juga memperluas daerah kekuasaannya di Kalimantan, yang memicu peperangan dengan Kesultanan Banjarmasin, dalam peperangan tersebut Belanda menang atas Kesultanan Banjarmasin dan berhasil menguasai wilayah Selatan Kalimantan. Belanda melihat bahwa kedudukan Kesultanan Kutai amatlah penting, apalagi dibagian Utara Kalimantan pengaruh dan kekuasaan Inggris mulai berkembang dan ini tidak diingankan Belanda. Untuk menyelesaikan persoalan antara kekuasaan Inggris dan Belanda, diadakan perjanjian, selagi

perjanjian ini masih dalam tahap permulaan, Belanda telah mendekati Kesultanan-kesultanan tanah Pribumi di bagian Timur Kalimantan.

Setahun setelah perjanjian tersebut telah ditandatangani dan wakil-wakil Belanda dan Inggris masih sibuk membicarakan pelaksanaan perjanjian tersebut di Eropa, Belanda berhasil mengadakan suatu pembicaraan denganS Kesultanan Kutai dengan hasil yang gemilang , baik bagi Inggris maupun Belanda. Melalui perjanjian tersebut Kesultanan Kutai memasuki suatu periode baru yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sejarahnya sendiri hingga tahun 1910.

Dalam perkembangan ekonomi Kesultanan Kutai ada tiga fase untuk memahaminya. Fase pertama pada tahun 1825-1846, ditandai oleh penetrasi kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atas Kesultanan Kutai. Dalam fase ini, antara Kesultanan Kutai dan Pemerintah Hindia Belanda terjadi suatu kontak yang dimulai dengan penandatanganan perjanjian tahun 1825. Dalam pasal-pasal perjanjian ini disebutkan bahwa Sultan Kutai mengikuti Kerajaan Belanda sebagai penguasa tertinggi atas wilayah kesultannya dan wilayah Kesultannya diberikan kepadanya sebagai suatu wilayah pinjaman dari Belanda.

Dalam fase kedua dimulai dari tahun 1846-1880, ditandai dengan adanya perubahan politik dan ekonomi secara besar-besaran dalam Kesultanan Kutai, baik secara teritorial maupun administrasi. Pada tahun 1850, Pemerintah Hindia-Belanda tidak menghendaki adanya perubahan politik

didalam Kesultanan Kutai agar stabilitas politik dapat dipertahankan. Sedangkan dalam fase ketiga dari tahun 1880-1910, adanya konsesi tanah yang diberikan kepada investo-investor Eropa untuk mengeksplorasi batubara dan minyak bumi diwilayah Kesultanan Kutai. Kutai menjadi suatu daerah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Pemerintah Hindia Belanda, sebagai penghasil minyak bumi tersebar di Kutai.

Sultan Kutai dan para pembesar kesultanan dapat memetik keuntungan ekonomi berdasarkan kedudukannya sebagai perantara-perantara. Didalam bidang kehidupan kemasyarakatan, kutai juga mengalami perubahan-perubahan yang besar. Heterogemitas masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya tidak dapat dihindarkan. Kesultanan Kutai yang di dasarkan pada kewibawaan dan otoritas Sultan ditelan dalam sistem pemerintahan Pemerintah Hindia Belanda yang menggunakan peraturan dan perjanjian formal dengan jenjang wewenang yang berbeda.

Pada akhirnya, apabila diarahkan pada masa silam Kesultanan Kutai telah menandatangani lima perjanjian atau kontrak politik, dan perkembangan Kesultanan Kutai yang bi bawah pengaruh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, memang memperhatikan dua sisi yaitu, sisi ekonomi dan politik.



Keraton Mempawah

Sejarah Kerajaan Mempawah

Pada awal berdirinya Kerajaan Mempawah yang pusat pemerintahannya bukanlah di Kota Mempawah (Ibukota Kabupaten Pontianak), melainkan berada dikawasan pegunungan Sidiniang (sekarang kawasan Administrasi Mempawah Hulu). Pada masa itu kerajaan yang terkenal adalah Kerajaan Bangkule Rajakng, dengan pusat ibukota di Sidiniang. Pada masa pemerintahan seorang penguasa yang diperkenalkan dengan nama Patih Gumantar, kerajaan Bangkule Rajakng (Sidiniang), berada dalam suasana kejayaan.

Sehingga kerajaan lain, khususnya kerajaan Biaju dari Sungkung ingin merebutnya, maka terjadilah peperangan kayau (memanggal kepala manusia). Dalam peperangan tersebut Patih Gemuntur yang dikenal dengan sangat gagah dan sebagai seorang pemberani, akhirnya kalah dengan serangan dadakan, hingga kepalanya di penggal oleh orang-orang suku (Dayak) Bidayuh (Biaju). Dengan kematian Patih Gumantar kerajaan Bangkule Rajangk mengalami kehancuran.

Diperkirakan dalam abad XVI atau sekitar 1610 M, kerajaan tersebut bangkit kembali dengan nama lain, yang di perkenalkan oleh seorang penguasa otonom lokal dengan nama Raja Kudong, yang pusat pemerintahannya berada di Bahana atau Pekana (sekarang berada dalam wilayah Adminitrasi Karangan Memapawah Hulu). Hadirnya kerajaan Bahana atau Pekana, samasekali tidak ada

hubungannya dengan Patih Gumantar, atau pun dengan kerajaan terdahulu. setelah Raja Kudang mangkat, pemerintahan dilanjutkan oleh Panembahan Senggoak, yang pusat kerajaannya berada didaerah Sengkauk hulu Sungai Mempawah sekarang.

Ada juga versi lain yang mencatat bahwa jauh sebelum Patih Gumantar memerintah maupun Panembahan Sengkauk, pernah pula memerintah seorang penguasa otonom lokal atau seorang raja yang bernama Patih Rumaga. Pusat pemerintahannya berkedudukan di Bakana, yang juga disebut dengan Pekana (dikecamatan Karangan Mempawah Hulu sekarang). Patih Gumantar yang pada masanya mendirikan pusat kerajaan yang baru di sebuah kaki bukit yang bernama Bukit Kandang. Sejak saat itulah kerajaan Bangkule Rajangk berganti nama menjadi Kerajaan Sebukirt Rama. Setelah Patih Gumantar mangkat,

kemudian digantikan oleh putranya Patih Ngabang, dan setelah Patih Ngabang wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Patih Sengkawuk. Setelah Patih Sengkawuk menduduki tahta, ia menikah dengan seorang putri jelita yang bernama Putri Cermin, yang berasal dari Tanah Melayu, anak Raja Kahar seorang bangsawan dari Kerajaan Baturijal Inderagiri (Sumatera Timur sekarang).

Pada akhir abad XV, Luwuk masih menjadi kekuatan yang paling dominan hampir di seluruh wilayah Bugis. Luwuk yang berusaha memperluas daerah kekuasaannya lebih jauh ke arah barat, ke jalur trans semenanjung lama yang menghubungkan Sungai Cenrana, melalui Danau Besar, dengan Selat Makassar di Suppa, dengan tujuan untuk menguasai daerah barat yang merupakan jalan keluar produk alam dan mineral dari pegunungan Toraja. Kerajaan-kerajaan yang

letaknya berada di sebelah barat danau, membentuk persekutuan wilayah barat Danau Aja Tappareng, sebuah persekutuan yang terus menerus dipererat dengan adanya ikatan perkawinan antarkeluarga raja-raja mereka. Konflik yang berkepanjangan dirasakan kerajaan Luwuk tampaknya telah mengantarkannya mundur dari supremasinya, dengan pimpinan terakhir Dewa Raja To Sengerreng bergelar Datu Kelali.

Luwuk yang nekat menyerang Bone mengalami kekalahan, penyerangan yang dilakukan oleh Luwuk dapat dihalau oleh Bone karena kekuatan yang dimilikinya pada saat itu terlalu kuat untuk ditandingi. Kerajaan Luwuk yang hampir tidak memiliki lagi kekuasaan duniawi, namun kerajaan ini tetap di muliakan sampai abad XX, Datu Luwuk tetap dianggap oleh raja lainnya sebagai yang paling terhormat dan paling tinggi derajatnya.

Mangkatnya Datu Luwuk Rajadewa, menimbulkan perselisihan antara dua keturunannya yaitu Sanggaria to Appaiyo dan Opu Daeng Lebba, yang saling bersaing untuk menjadi pengganti Rajadewa.

Pada akhir abad XVII masyarakat Sulawesi Selatan mengalami perubahan politik. Termasuk jatuhnya Makassar ke tangan Belanda, perpecahan politik, pergolakan internal, dan meningkatnya pengaruh tidak langsung budaya bendawi Barat. Serangan Belanda atas Makassar yang berhasil, ikut pula menghancurkan perahu-perahu Portugis yang sedang berlabuh. Konstelasi kekuatan pun berubah, dengan kerugian yang dialami di pihak Makassar, karena Bugis Bone dibawah pimpinan Arung Palakka mulai terlibat dalam peperangan.

Dampak dari jatuhnya Makassar adanya perubahan pola pelayaran

dan perantauan orang-orang Bugis dan Makassar. Sebagian orang Makassar berangkat ke Jawa untuk bergabung melawan Belanda yang dibantu orang Bone, ada pula yang merantau ke Sumatera hingga Thailand. Sedangkan orang Bugis memilih untuk merantau ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Pada awal tahun 1681, orang-orang Bugis sudah bertapak di Kelang dan Selangor, sejak itu Riau menjadi pusat pemerintahan dan dari Riau pulalah orang-orang Bugis campur tangan dalam pemerintahan Raja Kedah yang berasal dari Siak. Dalam sebuah hikayat dikisahkan bahwa pelayaran Opu Daeng yang berlima dengan saudaranya ke negeri-negeri Riau, Kalimantan, dan Tanah Melayu. Dengan tujuan utama mereka adalah untuk mencari kesenangan dari sifat kepahlawanan mereka dengan membantu raja-raja yang sedang dalam tawanan atau berperang

menentang musuh dengan beberapa syarat perjanjian.

Sebagai pelaut dan perantau yang berani, Opu Daeng dan empat saudaranya, kerap mengarungi samudera lepas, dan mereka pun telah mengunjungi berbagai negeri. Keberadaan mereka berlima di Kalimantan bermula dengan Pangeran Agung berperang dengan Sultan Muhammad Zainuddin karena berebut tahta kerajaan Matan. Sultan Muhammad Zainuddin beserta anak dan keluarganya terpaksa berundur ke Banjar (Kotawaringin), untuk bekerjasama dengan Sultan Banjar untuk mengambil kembali Kerajaan Matan. Lalu Sultan Banjar menitahkan sebuah perahu untu berlayar ke Siantan untuk memanggil anak Raja Bugis yang singgah di Siatan. Ketika suruhan Sultan Banjar berangkat ke Siantan, Sultan Muhammad Zainuddin sudah memulai

peperangan, namun kalah yang menyebabkan Muhammad Zainuddin dikurung dalam masjid beberapa bulan. Opu Daeng beserta saudaranya tiba di Matan dan berhasil membawa Sultan Zainuddin kembali ke Banjar.

Ketika Opu Daeng Menambun mangkat, putra mahkotanya Gusti Jamiril Pangeran Ratu Adijaya Kusuma Jaya yang masih muda, dibawa dan diasuh oleh seorang ulama Habib Husin Al Qadrie ke kawasan pemukimannya di kawasan Kuala Mempawah (sekarang), menanti putra mahkota mencukupi usianya untuk menduduki tahta Kerajaan Negeri Sebukit Rama. Setelah Habib Husin meninggal dunia, dengan demikian naik tahtalah putra mahkota pangeran Ratu Gusti Jamiril yang kemudian bergelar Panembahan Adijaya Kusuma Jaya. Tak berapa lama menduduki tahta kerajaan di Sebukit Rama, Panembahan Adijaya Kusuma Jaya

kemudian mengalihkan pusat kerajaan ke suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Mempawah.

Diperkirakan lokasi ibukota kerajaan Mempawah yang dibangun Panembahan Adijaya Kusuma Jaya atas petunjuk Habib Husein Al Qadrie berada di kawasan Pulau Pedalaman sekarang, tempat yang kemudian dibangun kembali istana Amantubillah yang ada sampai saat ini oleh Panembahan Gusti Muhammad Taufiq Aqqamaddin yang memerintah 1902-1944. Dalam masa pemerintahan Panembahan Adijaya Kusuma Jaya, kolonial Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaannya di Mempawah, dengan tujuan untuk menguasai Mempawah, karena itulah, Panembahan Adijaya menyatukan dua kekuatan besar rumpun kerabatnya, Melayu-Bugis di satu pihak dan Kayak disatu pihak, melakukan

perlawanan menentang kolonial Belanda. Namun dalam peperangan ini Panembahan Adijaya dan pengikutnya serta rakyatnya kemudian berhijrah meninggalkan negeri yang dibangunnya menuju ke Karangan dengan maksud untuk mendirikan pusat pemerintahan baru disana.

Belanda yang berhasil menguasai Mempawah, sepeninggalnya Panembahan Adijaya maka kelanjutan tahta yang ketika itu mengalami kekosongan penguasa, yang diteruskan oleh keponakannya, yaitu Syarif Kasim Alkadrie putra dari Utin Tjandramidi (adik kandung dari Panembahan Adijaya) yang bersuamikan Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman Alkadrie, putra dari Habib Husin Al Qadrie. Kurang lancarnya interaksi sosial antara Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie dengan putranya Syarif Kasim Alkadrie, yang disebabkan adanya fakta bahwa ayahnya lebih

mengingini putranya ini menjadi penguasa sementara di Mempawah dan tidak di Pontianak. Persetujuan Abdurrachman mengangkat putra-putranya, Kasim sebagai Panembahan Mempawah dan Osman sebagai Sultan Pontianak, didasarkan pada konsep putra daerah. Konsep itu, sebagai bagian dari pola tingkah laku manusia Bugis dalam politik lokal di Kalimantan Barat, ditambah dengan konsep arsitektur yang dilandasi faktor geografis, Mempawah berdekatan dengan kawasan laut.

Dalam perkembangannya, keputusan Kasim dan Panembahan Husin untuk mengembalikan pemerintahan Mempawah ke tangan pewaris yang paling berhak, yaitu putra dari Panembahan Adijaya Kusuma Jaya merupakan bentuk kesadaran politik untuk menciptakan kesetiakawanan sosial antara Kesultanan Pontianak (Qadriyah) dan Kerajaan

Mempawah (Amantubillah).

Hari jadi atau hari lahir kota Mempawah, ditandai dengan dibangunnya pusat pemerintahan kerajaan di Mempawah sekarang pada hari Rabu tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 1175 Hijriyah atau dalam tahun 1761 Masehi. Adanya catatan khusus mengenai Hari Jadi Negeri atau Kota Mempawah tersebut, bahwa terdapat suatu kesepakatan diantara para perumus mengenai Hari Jadi Kota Mempawah tersebut, tidak akan dihitung atau dialihkan perhitungan miladiyah atau hitungan Masehi.

Meski tidak lagi memiliki kekuasaan pemerintahan, kehadiran raja ditempatkan sebagai tempat bertanya dan berkonsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, D. 2002. *Salsilah Kutai*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1980. Diterbitkan ulang oleh Bagian Kehumasan dan Keprotolan Pemkab Kutai Kartanegara.
- Amin, Muh. Ali. 1977. *Manfaat Studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuna ditinjau dari Segi Sejarah dan Arkeologi*. Majalah Arkeologi.
- Ali, R.Moh. 1963. *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*. Bhratara: Jakarta.
- Ariwiadi, Drs. 1977. *Ikhtisar Sejarah Nasional Indonesia (Awal-Sekarang)*. Pusat Sejarah ABRI. Jakarta: Ahyat, Syamtasiyah. Ahyat, *Kesultanan Kutai 1825-1910*, Penerbit Serat Alam Media, Serpong Utara, Tangerang Selatan, 2013.
- Benda, Harry J. 1974. *Islam di Indonesia*. Tinta Mas: Jakarta.
- Boechari. 1977. *Manfaat Studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuna ditinjau dari segi Sejarah dan Arkeologi*. Majalah Arkeologi.
- _____, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia jilid II*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

- Cahyono, Dwi, dan H. Gunadi. 2007. *Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura*. Kutai Kartanegara: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Daliman, A. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Graff, De. 1985. *Kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Gunadi. 2004. *Manajemen Sumber Daya Arkeologi, jilid II*. Banjarmasin: IAAI Komda Kalimantan.
- _____, 2003. *Lembaga Penelitian Arkeologi Indonesia dan Obsesi Pengembangannya*. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi. Cisarua: Pusat Penelitian. Arkeologi Nasional.
- Kern, W. 1882. *Commentaar op de Salasilah van Koetei in Verband met de Geschiedenis van het Schriertlijke Academic van Wettenchapen of Letterkunde*.
- _____, 1916-1917. *Inscripties van de Indische Archipel*. VG, VI-VII. S-Graven-hage: Martinus Nijhoff.
- _____, 1917. *Taalkundige Gegeven ter Bepaling van het Stamland der MaleischPolynesische Volken*. VG. VII hal. 105-120.
- Slamet Muljana. 1968. *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*. Jakarta: Bhratara.

- Soekmono, R. 1973. *Sejarah Kebudayaan Indonesia III*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kansius.
- Vogel, J. Ph. 1918. *The Yupa Inscription of King Mulavarman from Koetai East Kalimantan*. Borneo: Bijdr. TLV. S'Gravenhage.
- Wahyuhono, Bambang Prasetyo dan Hartono, Tri. 1997. *Bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta: Tinjauan Kelestarian dan Pelestariannya*. Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komisariat. D.I Yogyakarta: Jawa Tengah.
- Yulianto, Ninie Susanti. *Prasasti sebagai Data Sejarah Kuna," Laporan Penelitian Proyek DIP-OP FSUI 1995/1966*. Depok: Fakultas Sastra Univ. Indonesia.

Perpustakaan
Jenderal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR